KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Novanto Tidak Menyangka Langsung Dithan KPK : Istri Diperiksa Terkait E-KTP
Tanggal : Selasa, 21 November 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

Novanto Tidak Menyangka Langsung Ditahan KPK

Istri Diperiksa Terkait E-KTP

[JAKARTA] Ketua DPR Setya Novanto mulai menjalani masa penahanannya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/11) hari. Novanto ditahan seusai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP selama sekitar satu setengah jam di Gedung KPK.

Novanto yang telah mengenakan rompi tahanan oranye mengaku menerima proses hukum yang dihadapinya, termasuk proses penahanan. Meskipun ia mengaku masih menderita sakit di kepala akibat kecelakaan tunggal yang dialaminya Kamis (16/11) malam.

"Saya sudah menerima tadi dalam kondisi saya yang masih sakit, masih vertigo karena tabrakan," kata Novanto seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/11) dini hari.

Sementara itu, pada Senin pagi, penyidik KPK memeriksa istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, terkait kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin pagi.

Deisti yang mengenakan batik kuning dan kerudung cokelat muda mendatangi Gedung KPK Jakarta pukul 09.53 WIB. Ia tidak berkomentar apa pun terkait pemeriksaannya. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Deisti pada Jumat (10/11), namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

Sebelumnya diketahui, Novanto sempat menghilang saat akan ditangkap KPK mengalami kecelakaan di Jl Permata Berlian, Jakarta Selatan. Mobil Fortuner yang ditumpanginya menabrak tiang listrik. Akibatnya, Novanto disebut terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Namun, tim dokter dan penyidik KPK memutuskan membawa Novanto ke RSCM untuk diperiksa lebih mendalam.

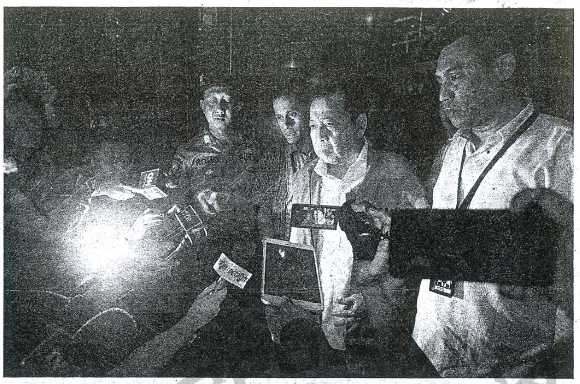

SP/JOANITO DE SAOJOAO

Ketua DPR RI Setya Novanto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan, seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/11) dini hari.

KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap Novanto pada Jumat (17/11). Namun, karena sedang dirawat, penahanan Novanto dibantarkan ke RSCM. Setelah dirawat tiga hari, berdasar pemeriksaan tim dokter dari RSCM dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), KPK membawa Novanto ke Gedung KPK untuk diperiksa dan ditahan.

Novanto mengaku tak menyangka akan langsung ditahan KPK. Selain sedang masa pemulihan, Novanto mengklaim sudah melakukan perlawanan hukum. Tak hanya menggugat penetapannya sebagai tersangka melalui praperadilan, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengaku sudah melakukan sejumlah langkah seperti melaporkan pimpinan KPK ke kepolisian hingga meminta perlindungan ke Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Saya tadi juga enggak menyangka malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk *recovery* tapi ya saya mematuhi hukum dan saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP di Kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung dan saya sudah pernah praperadilan," katanya.

KPK menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Novanto pada Rabu (15/11) setelah mantan Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu berulang kali mangkir dari pemeriksaan. Novanto setidaknya sudah tiga kali mangkir untuk diperiksa sebagai saksi dan satu kali mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka. Namun, Novanto sudah tidak berada di rumahnya saat tim penyidik mendatanginya pada Rabu (15/11) malam. Sejak malam itu, KPK bekerja sama dengan kepolisian untuk memburu Novanto. Keesokan harinya, KPK meminta Kepolisian dan Interpol memasukan nama Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO) karena setelah 1x24 jam sejak terbitnya Surat Perintah Penangkapan, mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu tak kunjung koperatif.

Tidak Mangkir

Novanto membantah telah tiga kali mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. Novanto mengklaim selalu memberikan alasan atas ketidakhadirannya. Saat dipanggil untuk diperiksa pada 30 Oktober, ia mengaku sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR dan menemui konstituennya di NTT.

Sementara pada 6 November, Novanto beralasan tak dapat memenuhi panggilan karena KPK harus mengantongi izin Presiden. Juga saat dipanggil untuk diperiksa pada 13 November. Selain soal izin, Novanto berdalih memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

"Saya belum pernah mangkir. Yang tiga kali saya diundang saya selalu memberikan alasan jawaban karena ada tugas-tugas yaitu menyangkut saksinya saudara Anang," katanya.

Daftar alasan Novanto untuk mangkir semakin panjang saat akan diperiksa penyidik sebagai tersangka pada Rabu (15/11). Selain alasan izin Presiden dan hak imunitas, Novanto beralibi sedang mengajukan uji materi UU KPK ke MK. Makanya, Novanto mengaku terkejut dengan sikap KPK yang langsung menahannya. Apalagi, pada Kamis (16/11) malam itu, Novanto mengaku sudah berniat untuk menyerahkan diri ke KPK. Namun, kecelakaan yang terjadi, kata Novanto membuatnya terluka berat dan mengurungkan rencananya menyerahkan diri.

"Saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali tahu-sudah sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka. Saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPD, tapi saya diminta untuk wawancara di Metro (Metro TV) dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka, terluka berat dan juga di kaki, di tangan, dan juga di kepala masih memar tetapi saya tetap mematuhi masalah hukum dan apapun saya tetap menghormati," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyatakan, hasil pemeriksaan tim dokter RSCM dan IDI menyatakan, Novanto tidak perlu menjalani rawat inap.

Diketahui KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. [F-5]

Presiden Minta Novanto Ikuti Proses Hukum

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Novanto taat kepada proses hukum. "Saya kan sudah menyampaikan agar Pak Setnov (Setya Novanto) mengikuti proses hukum yang ada," kata Presiden seusai membuka Simposium Nasional Kebudayaan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (20/11).

Presiden mengungkapkan, koordinasi hubungan pemerintah dan DPR tidak mengalami permasalahan. Disinggung mengenai perlunya Novanto diganti sebagai Ketua DPR, menurut Presiden, hal itu ranah DPR.

"Untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara, kan ada mekanismenya ya diikuti saja mekanisme yang ada di situ," ucapnya. [C-6]